

**REVITALISASI BIROKRASI MELALUI TRANSFORMASI BIROKRASI MENUJU
E-GOVERNANCE PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

A.H Rahadian
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
rahadian.ah@gmail.com

Abstrak. Upaya revitalisasi birokrasi termasuk dalam penataan kelembagaan, good governance telah dijadikan referensi utama, terutama dalam rangka membangun kolaborasi yang efektif antara 3 (tiga) pilar utama, yaitu government, private sector, dan civil society dengan mengusung nilai-nilai seperti competence, transparency, accountability, participation, rule of law, dan social justice.

Transformasi birokrasi pemerintah penting untuk tetap diarahkan kedalam perubahan dari desain lama yang kurang kondusif menuju desain baru yang lebih kondusif dalam mengembangkan inovasi, manajemen inovasi dan mengelola risiko serta integrasi organisasi untuk membangun kolaborasi dan sinergitas. Transformasi birokrasi pemerintah tersebut bukan hanya sekedar downsizing dan prosedural semata, tetapi lebih mengarah pada pola kerja, budaya organisasi dan nilai-nilai strategis yang dikembangkan. Transformasi birokrasi pemerintah memiliki peran strategis dalam peningkatan daya saing bangsa, dalam hal pendekatan institusional (kelembagaan), 'lalu-lintas' administrasi negara dari eksekutif 'turun' ke Kebijakan Administrasi, dimana transformasi organisasi berkaitan dengan budaya kerja dan tata kelolanya menjadi faktor determinan yang menentukan keberhasilannya.

Konsep e-governance adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship)

Revitalisasi birokrasi melalui e-governance menawarkan alternatif strategi mengubah pola kerja dan perilaku birokrasi. Good will pemerintah untuk menerapkan e-governance pada era revolusi industri 4.0, menjadi faktor penentu dalam implementasinya. Kemudian kebijakan Pemerintah melalui roadmap Making Indonesia 4.0, ternyata masih menghadapi kendala, terutama belum cukup tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai pada aspek manajerial pengelolaan situs.

Kata kunci : Revitalisasi birokrasi, transformasi birokrasi, e-governance, revolusi industri 4.0.

Abstract. Efforts to revitalize the bureaucracy, including in institutional arrangements, good governance has become the main reference, especially in the context of building effective collaboration between 3 (three) main pillars, namely government, private sector, and civil society by carrying out values such as competence, transparency, accountability, participation, rule of law, and social justice.

The transformation of government bureaucracy needs to continue to be directed into changes from old designs that are less conducive to new designs that are more conducive to continually developing innovation, managing innovation and managing risk and organizational integration in building collaboration and synergy. The transformation of government bureaucracy is not merely downsizing and procedural, but more fundamental to work patterns, organizational culture and strategic values developed. The transformation of government bureaucracy plays a strategic role in increasing national competitiveness, in institutional (institutional) approaches, 'traffic' of state administration from the executive 'down' to Administrative Policy, where organizational transformation with work culture and governance is the decisive determinant its success.

The concept of e-governance is to create friendly, comfortable, transparent and inexpensive interactions between G2C-government to citizens, government and business enterprises (G2B-government to business enterprises) and intergovernmental relations (G2G-inter-agency relationship)

Revitalization of bureaucracy through e-governance offers an alternative strategy to change work patterns and bureaucratic behavior. The government's good will to implement e-governance in the era of industrial revolution 4.0, became a determining factor in its implementation. Then the Government policy through the Making Indonesia 4.0 roadmap, it turns out, is still facing obstacles, especially not enough human resources (HR) are sufficient in the managerial aspects of site management.

Keywords: *Revitalization of bureaucracy, transformation bureaucracy e-governance, industrial revolution 4.0.*

PENDAHULUAN

Dalam merumuskan upaya revitalisasi birokrasi termasuk dalam penataan kelembagaan, *good governance* telah dijadikan referensi utama, terutama dalam rangka membangun kolaborasi yang efektif antara 3 (tiga) pilar utama, yaitu *government, private sector, dan civil society* dengan mengusung nilai-nilai seperti *competence, transparency, accountability, participation, rule of law, dan sosial justice.*

e-governance terdiri dari dua elemen penting yaitu ‘*governance*’ sebagai konsep utama dan ‘*electronic*’ atau ICTs (*Information and Communication Technologies*) sebagai alat untuk meningkatkan proses *governance*. Konsep *governance* berkembang sejak tahun 1980-an (Bevier,2007:364), sedangkan konsep *e-government* pertamakali berkembang di Amerika pada tahun 1993 (Gronlund,2007:364), sementara konsep penggunaan internet dalam *government* mulai diidentifikasi sejak 1970-an (Gronlund,2007:364). Sejalan dengan berkembangannya konsep *governance* dan perkembangan ICTs berkembang pula konsep *e-governance*, seiring dengan itu pula konsep *e-government* dan *e-governance* menjadi tumpang tindih. *e-governance* seringkali didefinisikan sangat sederhana mirip dengan *e-government* yaitu bagaimana pemerintah menggunakan ICTs untuk meningkatkan efisien terutama pada pelayanan publik. Kebanyakan penelitian *e-governance* terkonsentrasi

pada sektor publik, padahal konsep *governance* sesungguhnya terdiri dari banyak sektor, yang saling berhubungan dalam berbagai level/tingkat *governance*. Belakangan konsep *e-government* terus berkembang, dengan menambahkan makna meningkatkan proses demokrasi, sehingga pendefinisian *e-government* menjadi tumpang tindih pula dengan konsep e-demokrasi. Pada dasarnya problema ini karena ketidak jelasan atas pemahaman konsep ‘*governance*’ sebagai konsep utama pada *e-governance*.

Peta jalan (roadmap) “Making Indonesia 4.0” telah diluncurkan pada acara Indonesia Industrial Summit 2018 Rabu (4/4) lalu yang merupakan strategi industri nasional di era revolusi industri 4.0. Dibidang pendidikan tinggi, sosialisasi revolusi industri 4.0 juga gencar dilakukan oleh Kemenristekdikti. Berbagai upaya tersebut tanpa mengubah tata kelola dalam diri pemerintah hal tersebut tidak akan membawa rangkaian perubahan yang holistik, sebab revolusi industri 4.0 akan mendisrupsi di semua bidang.

Tata kelola pemerintahan pada masa revolusi industri 1.0 menekankan pada market *governance*, sebab sumber daya kunci adalah tenaga kerja. Pada revolusi industri 2.0 ketika mesin mulai membantu manusia, proses manajerial dikedepankan sehingga yang muncul adalah tata kelola yang hierarkis. Lalu revolusi industri 3.0 di era informasi yang berlimpah menghasilkan tata kelola kolaborasi dan jaringan. Kini, bagaimana dengan tata kelola di era revolusi industri 4.0?

Teknologi menghasilkan inovasi disruptif, yang mengganggu keamanan. Disrupsi, yang disebut Rhenald Kasali bukan sekedar fenomena hari ini (*today*), melainkan fenomena "hari esok" (*the future*) yang dibawa oleh para pembaharu ke saat ini, hari ini (*the present*) tidak memberi helaan nafas yang panjang bagi suatu pemerintahan untuk punya cukup waktu memikirkan kebijakan yang antisipatif.

Dampak revolusi Industri 4.0 yang merupakan bagian dari perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dalam berbagai sendi kehidupan, mulai dari penetrasi teknologi yang serba disruptif, hingga menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai akibat dari fenomena Internet of Things (IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (Artificial Intelligence).

Perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0 menyebabkan terjadinya fenomena disrupsi, dengan didukung kemajuan teknologi juga telah menyebabkan terjadinya kondisi transisi revolusi teknologi yang secara fundamental dalam kehidupan kita sehingga akan terjadi perubahan cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain.

Lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi yang berubah sebagai akibat Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi birokrasi pemerintah sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah menjadi sebuah konsep yang harus terus diupayakan oleh pemerintah sebagai alat bagi aparat pemerintah agar lebih responsif terhadap perubahan.

Revitalisasi birokrasi, melalui transformasi birokrasi pemerintah ini semakin berguna secara langsung untuk dipacu percepatannya jika kita merujuk pendapat Klaus Schwab, Executive Chairman World Economic Forum, yang menyampaikan hipotesa bahwa saat ini

miliaran orang telah terhubung dengan perangkat mobile, penemuan kecepatan pemrosesan byte demi byte data internet, yang telah menyebabkan peningkatan kapasitas pengetahuan manusia melebihi sistem konvensional.

Hal tersebut menyebabkan terjadinya keterbukaan akses dalam ilmu pengetahuan, dan menghilangkan batasan yang sebelumnya tidak terjadi. Semua ini dapat terjadi, disebabkan adanya terobosan teknologi baru di bidang robotika, Internet of Things, kendaraan otonom, percetakan berbasis 3-D, nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi, dan komputasi kuantum.

Seperti yang telah diketahui bersama, dampak dari revolusi industri 4.0 salah satunya adalah adanya otomatisasi dan adanya pengurangan jumlah tenaga kerja manusia dalam proses produksi. Hal ini tercatat oleh Klaus Schwab, Industri IT di Lembah Silicon tahun 2014 dimana menghasilkan pendapatan sebesar AS\$1,09 triliun hanya dengan mempekerjakan 137,000 orang. Sementara pada tahun 1990an, Detroit yang menjadi pusat 3 perusahaan otomotif besar dunia mempekerjakan pegawai sepuluh kali lebih banyak untuk menghasilkan pendapatan yang sama (Schwab 2017).

Beberapa fenomena kemajuan teknologi serta dampak yang diuraikan di atas, maka revitalisasi birokrasi melalui transformasi birokrasi pemerintah penting untuk dilakukan. Hal ini guna menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin tinggi sebagai akibat perkembangan era Revolusi Industri 4.0.

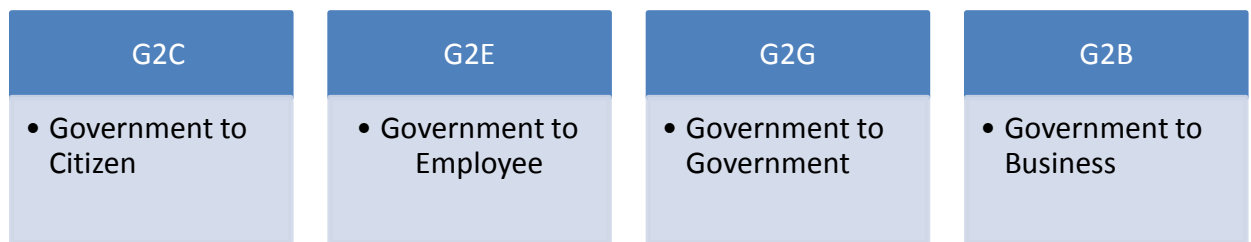
Konsekuensi dari perkembangan era Revolusi Industri 4.0 adalah meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah serta responsif yang tinggi dan cepat, sehingga membawa pada perubahan paradigma desain organisasi.

Efektifitas organisasi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tidak lagi ditentukan oleh

ukuran besarnya organisasi, struktur dan rentang kendali yang besar, tetapi yang lebih berperan adalah seberapa berhasil transformasi birokrasi yang dilakukan adaptif terhadap perubahan yang sedemikian cepat dalam menjawab fenomena *tomorrow is today*.

Oleh karena itu, Revitalisasi Birokrasi Melalui *e-governance* Pada Era Revolusi Industri 4.0, kebijakannya adalah Peta jalan (Roadmap) “Making Indonesia 4.0”, dilakukan melalui transformasi birokrasi pemerintah.

MODEL E-GOVERNANCE DI INDONESIA



Adapun konsep dari *e-governance* adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (*G2C-government to citizens*), pemerintah dan perusahaan bisnis (*G2B-government to business enterprises*) dan hubungan antar pemerintah (*G2G-inter-agency relationship*), Berikut penjelasannya : (Indrajit, 2006).

Government to Citizens (G2C)

Merupakan aplikasi pengembangan *e-government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Tujuan utamanya untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

Government to Business (G2B)

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, *entity* bisnis semacam perusahaan swasta

membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Terbentuknya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan pihak swasta. Contohnya para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis *web* untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet, proses lelang proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui situs web mulai dari proses pengumuman sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender.

Government to Government (G2G)

Meningkatnya kebutuhan bagi Negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari tidak hanya berkisar ada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar entiti-entiti negara seperti pemerintah daerah dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan pembangunan.

Berbagai penerapan yang telah berlangsung seperti hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah dengan mempergunakan situs web baik ditingkat Kementerian sampai pada Pemerintah daerah.

Government to Employees (G2E)

Diperuntukkan bagi peningkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja disejumlah institusi pelayanan masyarakat seperti sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi dan promosi seluruh karyawan pemerintah, sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintah yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya. Penerapannya antara lain :

1. Menyediakan *e-learning*
2. Mensosialisasikan *Knowledge Sharing*
3. Menyediakan akses informasi dan pengetahuan seluas-luasnya
4. Memberikan kesempatan setiap pegawai dari berbagai jenjang level untuk mendapatkan pelatihan maupun pendidikan yang lebih tinggi.
5. Memberikan penghargaan berupa materi maupun non materi untuk pegawai berprestasi

KONDISI E-GOVERNANCE DI INDONESIA

Hubungan E-Governance dan E-Government

1. *E-governance* merupakan bentuk dukungan terhadap jalannya *e-government* dengan menekankan hubungan antara pemerintah,

masyarakat dan swasta berbasis teknologi informasi

2. *E-governance* muncul sebagai wujud dari adanya *e-government*
3. *E-governance* merupakan bentuk tatakelola terhadap implementasi *e-government*
4. *E-governance* terdapat 3 buah hal yang ditekankan untuk hukum, peraturan, dan regulasi untuk mendukung jalannya *e-government* dan pengetahuan masyarakat akan manfaat *e-government*.

Dengan demikian kondisi *e-governance* sangat dipengaruhi oleh kondisi *e-government*. Gambaran dari *e-government* di Indonesia tahun 2018, sesuai survei yang dilakukan oleh *E-Government Development Index* (EGDI), menunjukkan pada tahun ini Indonesia mendapat peringkat ke-107 EGDI, naik 9 peringkat dibandingkan tahun 2016 yang menduduki peringkat ke 116. Indonesia menempati peringkat ke-7 di ASEAN setelah Vietnam, masih sama seperti tahun 2016. Peringkat Indonesia ini masih berada jauh di bawah negara-negara di ASEAN lainnya seperti Singapura (peringkat ke-7 EDGI), Malaysia (peringkat ke-48 EDGI), Brunei Darussalam (peringkat ke-59 EDGI), Thailand (peringkat ke-73 EDGI), Philippines (peringkat ke-75 EDGI), dan Vietnam (peringkat ke-88 EDGI).

Posisi pertama hingga kelima, berturut-turut diraih oleh Denmark, Australia, Republik Korea, United Kingdom, dan Swedia.

Nilai rata-rata EGDI Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata di regional Asia Tenggara. Indonesia berada pada angka 0,5258 sedangkan rata-rata EGDI di kawasan Asia Tenggara adalah 0,5555.

Hasil peringkat EGDI ini harus semakin mendorong untuk dapat lebih meningkatkan implementasi E-Government di seluruh penjuru negeri. Hal ini tentunya menjadikan suatu tantangan untuk dapat lebih meningkatkan

kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta infrastruktur TIK.

implementasi E-Government di Indonesia masih separoh jalan dan masih jauh di bawah standar yang ideal dan yang diinginkan. Kekurangan idealnya bukan saja dalam konteks lokal namun juga dalam konteks global. Capaian secara kuantitatif menunjukkan progress yang cukup berarti namun dari sisi kualitas belum memadai karena kekurangan di dalam SDM, infrastruktur serta regulasinya. Oleh karena itu maka harus dilakukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan *e-government* dari berbagai sisi. Adanya regulasi dan standard pembangunan *e-government* perlu dibuat agar tidak terjadi pendefinisian dan pemaknaan *e-government* secara sendiri-sendiri oleh pihak penyelenggara, di tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah.

REVITALISASI BIROKRASI MELALUI TRANSFORMASI BIROKRASI MENUJU E- GOVERNANCE

Dinamika perkembangan hubungan organisasi bisnis agar tetap bertahan di tengah derasnya arus globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, perlu dijadikan pelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus melakukan perubahan kedalam bentuk ideal agar dapat menghadapi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada, meskipun ada perbedaan misi, tetapi transformasi organisasi pemerintah merupakan salah satu alternatif yang dapat diambil dalam rangka mewujudkan organisasi yang berorientasi layanan publik.

Transformasi birokrasi pemerintah perlu diarahkan agar terjadi perubahan dari desain lama yang kurang kondusif menjadi desain baru yang lebih kondusif untuk terus mengembangkan inovasi, manajemen inovasi dan mengelola risiko serta integrasi organisasi dalam membangun kolaborasi dan sinergitas.

Inovasi tingkat organisasi menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan berkembangnya kreativitas yang tidak dibatasi oleh hirarki yang ketat, hal ini memerlukan adanya perubahan struktur organisasi, proses komunikasi dan koordinasi dan menghilangkan hambatan-hambatan struktural.

Birokrasi dalam struktur organisasi pemerintah yang selama ini mekanistik, hierarkis birokratis, departementalisasi yang kaku, formalisasi tinggi dan sentralistik perlu terus ditransformasikan ke arah organisasi yang organik, ditandai dengan informasi yang mengalir bebas, formalisasi rendah dan tim lintas fungsi, untuk menjawab ketidakpastian yang tinggi dan lingkungan strategis organisasi pemerintah yang semakin dinamis dan kompleksitas yang tinggi.

Pengembangan kepemimpinan transformasi dengan visioner yang terukur pada berbagai level kepemimpinan dalam organisasi pemerintah menjadi tanda transformasi birokrasi. Kepemimpinan diperlukan untuk memastikan setiap inovasi yang dikembangkan dapat memberikan nilai tambah kualitas pelayanan, menyelaraskan visi dan lingkungan internal yang diikuti dengan kemampuan untuk merespons perubahan lingkungan eksternal yang bergerak cepat dalam era Revolusi Industri 4.0 ini.

Transformasi birokrasi pemerintah tersebut bukan hanya sekedar downsizing dan prosedural semata, tetapi lebih mendasar terkait dengan pola kerja, budaya organisasi dan nilai-nilai strategis yang dikembangkan. Transformasi organisasi pemerintah memiliki peran strategis dalam peningkatan daya saing bangsa, di dalam pendekatan institusional (kelembagaan), 'lalu-lintas' administrasi negara dari eksekutif 'turun' ke Kebijakan Administrasi, dimana transformasi organisasi dengan budaya kerja dan tata kelolanya menjadi faktor determinan yang menentukan keberhasilannya.

Birokrasi yang dikembangkan melalui transformasi yang terencana dan

terukur sangat dibutuhkan untuk menjawab problem statement yang selama ini dianggap sebagai kelemahan organisasi pemerintah, maka perlu meningkatkan responsivitas, transparansi, membangun sistem dan mekanisme yang accessible sehingga memungkinkan adanya “checks and balances”.

Transformasi birokrasi dalam pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu gaya kepemimpinan, budaya kerja, proses kerja kekuatan kerja, dan struktur organisasi yang dikembangkan sehingga adaptif terhadap perubahan dan dapat meningkatkan kecepatan birokrasi dalam perizinan, melayani investasi-investasi serta meningkatkan daya saing bangsa.

Perubahan pola pikir harus ada dalam transformasi birokrasi pemerintah, terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, di lingkungan K/L organisasi pemerintah, dengan fokus pada pengukuran kinerja berbasis value for money, serta semakin meningkatkan azas Performance Based Budgeting yang fokus pada sasaran, outcome dan output, dengan memanfaatkan teknologi dalam membangun dashboard kepemimpinan di berbagai level kepemimpinan, sehingga dapat terjadi kontrol mulai dari tahapan perencanaan pelaksanaan pengawasan hingga pelaporan.

Peluang besar yang diberikan oleh Revolusi Industri 4.0 adalah mengefektifkan fungsi dan peran organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Selain itu perkembangan IT yang cepat dapat menjadi peluang dalam percepatan penerapan e-governance, sebagai digitalisasi data dan informasi seperti e-budgeting, e-project planning, system delivery, penatausahaan, e-controlling, e-reporting hingga e-money serta aplikasi custom lainnya.

Pilihan strategis dengan memanfaatkan IT pada birokrasi pemerintah sangat diperlukan untuk membangun mental self-driving, self-

power, kreativitas dan inovasi, ketika mesin dibuat menjadi lebih pandai dari manusia, maka pintar saja tidak cukup. Teamwork yang mengedepankan kolaborasi dan sinergi bukan kompetensi perlu dibangun, selain itu juga dibutuhkan adanya kesepahaman pola pikir dan cara bertindak dalam menghadapi era digitalisasi teknologi di semua lini.

E-governance bukan hanya sekedar website pada internet, tetapi mencakup fungsi yang sangat luas, yang seringkali dikaitkan dengan *e-democracy* dan *e-government* (Backus, Michiel, 2001). *E-democracy* itu sendiri merupakan suatu proses dan struktur yang memfasilitasi segala bentuk interaksi secara elektronik antara pemerintah (sebagai pihak yang dipilih) dengan masyarakat (citizen=sebagai pihak yang memilih). Sedangkan konsep *e-government* adalah merupakan suatu bentuk e-bisnis disektor pemerintah yang mengacu pada suatu proses dan struktur yang ditujukan pada penyediaan pelayanan publik secara elektronik baik kepada masyarakat umum (*citizens*) dan pengusaha (*businesses*). Dari kedua konsep tersebut, maka *e-government* dapat disimpulkan sebagai aplikasi dari alat-alat elektronik dalam (1) interaksi antara pemerintah dengan masyarakat (*citizens*) dan pemerintah dengan kalangan pengusaha (*businesses*); (2) kegiatan operasional internal pemerintahan. Interaksi melalui media elektronik tersebut semata-mata adalah dalam rangka memudahkan dan mendorong terciptanya demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Adapun pengertian lain dari *e-governance* adalah suatu sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet untuk merekam dan melacak informasi publik, dan memberi akses layanan publik oleh instansi pemerintah (Abidin, Zaenal, 2001 dalam Azari, Idham, 2002). Holmes (2001) sebagaimana dikutip oleh Muluk (2001) menjelaskan bahwa *e-government*

merupakan penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, dekat dengan pelanggan, efektif biaya, dan dengan cara yang berbeda tetapi lebih baik. Penjelasan-penjelasan tentang *e-government* tersebut mengacu pada karakteristik *good governance* yang mensyaratkan adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Information communication technologies (ICTs) berbeda dengan Information technology (IT) yang selama ini telah banyak dikenal. Jika IT telah lama digunakan di lingkungan pemerintahan di Negara-negara sedang berkembang bahkan hampir lebih dari 30 tahun, namun belum dapat digunakan untuk memfasilitasi dan mendorong kehidupan berdemokrasi dan pemerintahan yang bersih. Hal ini dikarenakan sifat IT yang hanya digunakan sebagai otomatisasi pengolahan data (*data processing*) yang dimanfaatkan oleh pemerintah secara internal saja, sedangkan penggunaan ICTs adalah dalam rangka mendukung proses transformasi eksternal pemerintah melalui pemrosesan dan pengkomunikasian data yang biasa dikenal dengan istilah *digital connections*. *Digital connections* ini meliputi: (1) hubungan antara dan dalam pemerintahan itu sendiri dalam rangka — joint-up thinking; (2) hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau LSM dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemerintah; (3) hubungan antara pemerintah dengan masyarakat bisnis (privat) dalam rangka peningkatan pelayanan; (4) antar masyarakat dalam rangka pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan kata lain penerapan *e-governance* berarti telah terjadi pergeseran dari *e-administration* (peningkatan penyelenggaraan tertib pemerintahan) menuju *e-citizens* (peningkatan hubungan pemerintah dengan warga negaranya), *e-services* (peningkatan pelayanan publik) dan *e-society* (interaksi dan sinergi antara berbagai komponen masyarakat). Ketiga domain tersebut

masing-masing saling bersinggungan atau bersinergi sebagai kekuatan bagi terciptanya *good governance* melalui *e-governance* sebagai bentuk tata kelola Pemerintahan memasuki revolusi industri 4.0 .

Disisi lain tingkat perkembangan *e-governance* sangat dipengaruhi oleh perkembangan *e-governance*, sebagaimana dikemukakan hasil penelitian Safitri Jaya (2013), yaitu :

Implementasi *e-governance* Indonesia saat ini, dilihat dari sisi aplikasi layanan baik itu G2C, G2B, maupun G2G, Indonesia saat ini masih tertinggal jauh. Layanan back office (G2B) masih belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap layanan front office (G2C dan G2B), hal itu juga disebabkan oleh kurangnya komitmen dari para stakeholder. Penerapan ICT yang belum merata, tingkat kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang handal juga tercermin pada budaya kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan. Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah baik itu tentang tujuan penerapan, manfaat bahkan strategi pengembangan *e-government* belum sepenuhnya dilaksanakan.

PENUTUP

Upaya revitalisasi birokrasi melalui transformasi birokrasi menuju *e-governance* termasuk dalam penataan kelembagaan, *good governance* telah dijadikan referensi utama, terutama dalam rangka membangun kolaborasi yang efektif antara 3 (tiga) pilar utama, yaitu *government*, *private sector*, dan *civil society* dengan mengusung nilai-nilai seperti *competence*, *transparency*, *accountability*, *participation*, *rule of law*, dan *social justice*.

Revolusi Industri 4.0 sejatinya memberikan peluang besar dalam mengefektifkan fungsi dan peran organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, perkembangan IT yang cepat dapat menjadi peluang

dalam percepatan penerapan *e-governance*, sebagai digitalisasi data dan informasi seperti *e-budgeting*, *e-project planning*, *system delivery*, penatausahaan, *e-controlling*, *e-reporting* hingga *e-monev* serta aplikasi *custom* lainnya.

Untuk bisa mengelola Revolusi Industri 4.0 diperlukan gaya pemerintahan yang kreatif, adaptif, cepat, dan mumpuni dalam mengelola perubahan eksponensial yang dihasilkan oleh Revolusi Industri 4.0. Inilah yang disebut "*agile government*".

Revitalisasi birokrasi melalui *e-governance* ditempuh melalui Information communication technologies (ICTs), yaitu proses transformasi eksternal pemerintah melalui pemrosesan dan pengkomunikasian data yang biasa dikenal dengan istilah *digital connections*. *Digital connections* ini meliputi: (1) hubungan antara dan dalam pemerintahan itu sendiri dalam rangka — joint-up thinking; (2) hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau LSM dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemerintah; (3) hubungan antara pemerintah dengan masyarakat bisnis (privat) dalam rangka peningkatan pelayanan; (4) antar masyarakat dalam rangka pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan kata lain penerapan *e-governance* berarti telah terjadi pergeseran dari *e-administration* (peningkatan penyelenggaraan tertib pemerintahan) menuju *e-citizens* (peningkatan hubungan pemerintah dengan warga negaranya), *e-services* (peningkatan pelayanan publik) dan *e-society* (interaksi dan sinergi antara berbagai komponen masyarakat).

Revitalisasi birokrasi melalui transformasi birokrasi menuju *e-governance* pada era revolusi industri 4.0, dilakukan dengan merubah desain birokrasi pemerintah yang lebih kondusif guna mengembangkan inovasi dan membangun kolaborasi serta sinergitas didahului dengan pengembangan kepemimpinan transformasi yang visioner terukur pada berbagai level kepemimpinan

sehingga dapat memastikan inovasi yang dikembangkan memberikan nilai tambah kualitas pelayanan, menyelaraskan visi dan lingkungan internal yang diimbangi dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap perubahan lingkungan eksternal yang bergerak cepat dalam era revolusi industri 4.0.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Idham (ed), (2002) *Good Governance dan Otonomi Daerah: menyongsong AFTA tahun 2003* (Yogyakarta: Prosumen dan Forkoma-MAP, UGM, 2002).
- Bevier, Mark (2007), *Governance*, pada: Bevier, Mark (ed.), *Encyclopedia of Governance*, Vol. I, Los Angeles: Sage Publication.
- Backus, Michiel. 2001. *E-governance and Developing Countries: Introduction and Examples*
- Gronlund, Ake (2007), *Electronic Government*, pada: Anttiroiko, Ari-Veiko and Matti Malkia (eds.), *Encyclopedia of Digital Government*, Volume I, Hershey: Idea Group Reference.
- Hoessein, Bhenyamin, (2001), *Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Idealisasi Kebijakan Desentralisasi, Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol.IX/2/Mei/2001.
- Muluk, M.R. Khairul, (2001) *Lokalisasi dan Globalisasi: tantangan dan peluang Digitalisasi Pemerintah Daerah, Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol.IX/2/Mei/2001.
- Indrajit, R.E.I (2006), *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006.
- Jaya, Safitri (2013), *Implementasi Dan Perkembangan E-Government di*

Indonesia, Jurnal Informatika
Multimedia (JIM), Volume 2 Nomor
1, Kediri.

Thoha. Miftah,(2003), Birokrasi dan
Politik di Indonesia (Jakarta:
Rajawali Press.